

AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PSAK NOMOR 18

***Pension Fund Accounting
In Social Security Administrator (BPJS) Employment
Based On PSAK Number 18***

YASMI *1)

Universitas Fajar
yasmi.fadhli44@gmail.com

DIAN EKAWATY *2)

Universitas Fajar
dian.ekawaty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi dana pensiun pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan cara membandingkan akuntansi dana pensiun di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar dengan PSAK Nomor 18.

Setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh hasil bahwa perlakuan akuntansi dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK Nomor 18, mulai dari pokok-pokok peraturan yang diterapkan, baik dari sisi iuran maupun pembayaran manfaat pensiunnya. Namun pada BPJS Ketenagakerjaan tidak mencantumkan data peserta program jaminan pensiun.

Kata Kunci : Akuntansi, Dana pensiun, PSAK Nomor 18

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the application of pension fund accounting in the Social Security Administrator (BPJS) Employment with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) Number 18. This study uses a comparative descriptive method by comparing the accounting of pension funds in the Social Security Administrator (BPJS) Employment of Makassar Branch with PSAK Number 18.

After doing research, the authors obtained the result that the application of pension fund accounting BPJS Employment of Makassar Branch has been in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) Number 18, starting from the principles of the regulations applied, both in terms of contributions and payment of pension benefits. However, BPJS Employment does not include data of participant of pension program.

Keywords: Accounting, Pension fund, PSAK No. 18

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana bekerja merupakan sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu tersebut sudah tidak lagi produktif bekerja. Kebutuhan yang tercukupi merupakan suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang, terutama ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dari itu dibutuhkan suatu jaminan.

Jaminan kesejahteraan adalah hal terpenting bagi setiap orang yang bekerja. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari risiko-risiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya (Latumaerissa, 2017:689). Untuk itu, setiap karyawan berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, dengan berusaha sebaiknya dalam bekerja tidaklah cukup tanpa adanya penyisihan pendapatan selama masa aktif bekerja dimana harapan untuk menikmati kesejahteraan dihari tua setelah pensiun sulit untuk terwujud.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Mengingat hal tersebut, pada saat ini dalam masyarakat kita telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun.

Pelaporan keuangan dana pensiun juga ditentukan oleh faktor kebijakan manajemen perusahaan yang mengatur program pensiun. Kebijakan manajemen ini nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan mengenai kewajiban laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan peraturan program pensiun yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standar pelaporan. Laporan keuangan ini harus bisa menginformasikan bahwa dana yang ada memang benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut. Selain itu, laporan dana pensiun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan agar tidak memberikan keputusan yang salah.

Pengelolaan dana pensiun baik pada setiap perusahaan atau bank perusahaan milik negara (BUMN) maupun perusahaan yang bukan milik pemerintah (non BUMN) diberi kesempatan mendirikan dana pensiun bagi pegawainya. Salah satu badan hukum yang mengelola dana pensiun yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme jaminan sosial nasional. BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT. Jamsostek (Persero) berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Jaminan Pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Untuk memperkuat posisi BPJS Ketenagakerjaan, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 Pasal 4 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang mewajibkan pemberi kerja baik lembaga pemerintah maupun non lembaga pemerintah mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 hari sejak tanggal pekerja tersebut mulai bekerja.

Pada PSAK No. 18 dijelaskan bahwa dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku khusus untuk dana pensiun sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan, yakni PSAK No. 18. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dana pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aktiva dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Adanya kekhususan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada dana pensiun, maka BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu badan hukum publik penyelenggara program pensiun harus mempunyai prosedur dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan pedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 dan peraturan yang mengatur. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Adapun masalah pokok dalam pembahasan ini adalah apakah prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18.

TINJAUAN TEORI

Konsep Dasar Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18, dana pensiun adalah suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Kasmir (2013:290), tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri.

Sedangkan jika tiga pihak, yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola dana pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan tersendiri.

Manfaat pensiun pada prinsipnya berkaitan dengan usia dimana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun (Latumaerissa, 2017:670). Manfaat pensiun dapat dibedakan atas 4 jenis yaitu : 1. Manfaat Pensiun Normal (*Normal Retirement*), 2. Manfaat Pensiun Dipercepat (*Early Retirement*) 3. Manfaat Pensiun Ditunda (*Deffered Retirement*) 4. Manfaat Pensiun Cacat (*Disable Retirement*). Menurut Latumaerissa (2017:675) jenis pensiun terbagi atas dua yaitu : 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) : dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, dan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) : dibentuk oleh Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ), yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) pesertanya (UU No.11/1992).

Jenis-jenis program pensiun menurut Kasmir (2013:293), program pensiun terbagi atas dua jenis yaitu 1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) : Merupakan program pensiun yang besarnya manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang di potong dari gajinya. 2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) : Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja.

Akuntansi Dana Pensiun

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan dana pensiun pemberi kerja sebagai badan yang mengelola dan menjalankan program pensiun, timbul beberapa permasalahan akuntansi yang bersifat khusus, yaitu:

1. Pengakuan Kewajiban Aktuaria : dalam metode program pensiun manfaat pasti, pemberi kerja menjanjikan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta dengan jumlah yang ditetapkan. Dengan demikian pada saat program pensiun dibentuk, pada saat itu juga timbul kewajiban untuk membayar manfaat pensiun. Kewajiban ini disebut kewajiban aktuaria. Kewajiban aktuaria adalah nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan Dana Pensiun Pemberi Kerja kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan.
2. Pencatatan Penerimaan Iuran Pensiun : dalam akuntansi DPPK dikenal adanya perkiraan baru yang disebut sebagai perkiraan iuran pensiun, yaitu perkiraan untuk menampung semua iuran pensiun yang telah jatuh tempo untuk satu periode tertentu baik yang sudah diterima pembayarannya maupun belum. Perkiraan iuran pensiun bersifat sebagai kewajiban bagi DPPK dan merupakan akun sementara (*temporary account*), sehingga pada akhir periode saldo iuran pensiun akan disesuaikan ke perkiraan kewajiban aktuaria.
3. Pencatatan Pembayaran Manfaat Pensiun : untuk membukukan pembayaran manfaat pensiun digunakan perkiraan manfaat pensiun. Perkiraan ini akan

menampung semua pembayaran manfaat pensiun selama satu periode tertentu dan bersifat sebagai *temporary account*. Setiap pembayaran manfaat pensiun akan dicatat dengan mendebet perkiraan manfaat pensiun dan mengkredit kas/bank atau hutang manfaat pensiun jika manfaat pensiun belum dibayarkan kepada pensiunan. Hutang manfaat pensiun dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek.

Standar Akuntansi Dana Pensiun

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang akuntansi program pensiun. Latar belakang PSAK 18 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan ini diterapkan dalam laporan keuangan program manfaat purnakarya pada saat penyusunan laporan keuangan tersebut.
2. Program manfaat purnakarya kadang di kenal dalam berbagai istilah, seperti: program pensiun, tunjangan hari tua, program purnabakti, dan program purnakarya. Pernyataan ini menganggap program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program purnakarya.
3. Pernyataan ini mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan peserta secara individual tentang hak manfaat purnakaryanya.
4. Program manfaat purnakarya dapat berupa program iuran pasti atau program manfaat pasti. Dalam hal program manfaat purnakarya diselenggarakan sebagai dana program terpisah, maka program ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pernyataan ini tidak mengatur tentang kesejahteraan karyawan dalam bentuk lain, misalnya kewajiban pemberian pesangon, perjanjian kompensasi yang ditangguhkan (*deferred compensation arrangements*), tunjangan cuti jangka panjang, pensiun dini tertentu atau program pemutusan kontrak kerja, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, atau program bonus. Jaminan sosial pemerintah juga di luar lingkup pernyataan ini.

Laporan Keuangan Dana Pensiun

Isi dari laporan keuangan dana pensiun telah diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 18, yaitu harus menyajikan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Aset Neto Tersedia : laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih dana pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Nilai aset neto tersedia dana pensiun adalah jumlah kekayaan dana pensiun dikurangi dengan kewajiban dana pensiun di luar kewajiban aktuarial atau kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo. Untuk penyusunan laporan aktiva bersih meliputi : Nilai aktiva pada akhir periode, dasar penilaian aktiva, investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenisnya dan Kewajiban selain kewajiban aktuarial.
2. Laporan Perubahan Aset Neto Tersedia : laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang terperinci atas penambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama satu periode tertentu. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk dana pensiun menunjukkan hal-hal berikut :

- iuran pemberi kerja, iuran pekerja, penghasilan investasi seperti bunga dan dividen, penghasilan lain, manfaat yang di bayarkan atau terutang, beban administrasi, beban lain, pajak penghasilan, laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi dan pengalihan dari dan kepada program pensiun
3. Neraca : merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu (Kasmir, 2014:8). Pada neraca dana pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas aset dan kewajiban dana pensiun. Nilai neraca menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu dan terdiri dari aset yang dikurangi dengan kewajiban. Komponen neraca dana pensiun adalah: posisi keuangan dana pensiun, nilai historis khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajarnya.
 4. Perhitungan Hasil Usaha : perhitungan hasil usaha adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha dana pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus dana pensiun pada periode yang bersangkutan, agar hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas (Bukit, 2012:30), maka : harus diungkapkan secara terinci unsur pendanaan dan beban, harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan di luar investasi, adapun bagian dari perhitungan hasil usaha, pendapatan dan beban investasi, beban administrasi, pendapatan lain-lain
 5. Laporan Arus Kas : laporan keuangan arus kas (*cash flow statement*) memiliki pengertian sebagai laporan keuangan dana pensiun yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas (*Cash Flow Statement*) meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive.
 6. Catatan Atas Laporan Keuangan : dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18, catatan atas laporan keuangan harus mencakup : Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan, Nama pendiri dana pensiun dan mitra pendiri (jika ada), Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun, Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan, Jenis program pensiun, iuran yang berasal dari peserta (jika ada).

Laporan Aktuaris

Pengertian Aktuaris Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dimaksud Aktuaris adalah sebagai berikut: "Aktuaris adalah aktuaris yang bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuarial yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang usaha perasuransian". Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisa kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran dimasa depan dan kapan pembayaran dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif komparatif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif. Dalam hal ini disebut kualitatif, yakni tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Sujarweni, 2015:11). Penelitian dilakukan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar Jl. Urip Sumoharjo KM.4, Makassar, Sulawesi Selatan. Data-data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data tahun 2016 kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 18 yang berkaitan dengan Dana Pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik pengamatan (observasi), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu proses pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran.
2. Teknik wawancara, adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan dana pensiun dan mencatat jawaban responden.
3. Teknik dokumentasi, yaitu berupa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat dari catatan atau dokumen yang ada seperti laporan keuangan, prosedur pelaksanaan program jaminan pensiun dan profil perusahaan.

HASIL

1. Laporan Aktiva (Aset) Bersih

Tabel .1
Laporan Aktiva (Aset) Bersih Tahun 2016

| LAPORAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| KETERANGAN | 2016 (dalam Rp) | 2015 (dalam Rp) |
| ASET | | |
| Investasi (Nilai Wajar) | | |
| Surat Berharga Negara | 1.283.965.221.997 | 935.247.806.233 |
| Tabungan | 10.549.520.000 | 0 |
| Deposito On Call | 12.185.000.000 | 64.700.000.000 |
| Deposito Berjangka | 611.225.000.000 | 554.560.968.493 |
| Saham | 789.297.940.489 | 681.201.847.369 |
| Obligasi | 2.653.658.934.287 | 2.742.120.555.987 |
| Sukuk | 9.985.750.000 | 0 |
| Unit Penyertaan Reksadana | 1.041.513.927.175 | 1.057.019.666.817 |
| Penyertaan Langsung pada Saham | 401.000.759.000 | 202.250.699.000 |
| Tanah | 78.274.000.000 | 78.274.000.000 |
| Bangunan | 418.487.800.000 | 418.487.800.000 |
| Tanah dan Bangunan | 356.939.562.728 | 350.611.000.000 |
| Total Investasi | 7.667.083.415.676 | 7.084.474.343.899 |
| Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi | 66.284.648.897 | 59.613.436.013 |
| Jumlah Aset Operasional | 3.489.672.202 | 3.613.969.088 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lain-lain | 4.989.726.000 | 189.726.000 |
| Aset Tersedia | 7.741.847.462.775 | 7.147.891.475.000 |
| JumlahLiabilitasdiLuarNilaiKiniAktuarial | 18.573.331.883 | 22.235.516.902 |
| ASET NETO | 7.723.274.130.892 | 7.125.655.958.098 |

Sumber: LK Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, 2016

2. Laporan Perubahan Aktiva (Aset) Bersih

Tabel .2

Laporan Perubahan Aktiva (Aset) Bersih Tahun 2016

**LAPORAN PERUBAHAN
 ASET NETO PER 31
 DESEMBER 2016 DAN
 2015**

| KETERANGAN | 2016 (dalam Rp) | 2015 (dalam Rp) |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PENAMBAHAN | | |
| Pendapatan Investasi | 627.407.223.788 | 635.892.087.927 |
| Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi | 230.304.398.286 | (332.924.882.066) |
| Iuran Jatuh Tempo : | | |
| - Iuran Normal Pemberi Kerja | 139.648.186.143 | 148.677.808.836 |
| - Iuran Normal Peserta | 62.493.932.697 | 66.271.220.620 |
| - Iuran Tambahan | 250.772.329.623 | - |
| Pendapatan Diluar Investasi | 618.948.940 | 637.054.364 |
| Total PENAMBAHAN | 1.311.245.019.477 | 518.553.289.681 |
| PENGURANGAN | | |
| Beban Investasi | 24.367.598.340 | 29.963.607.121 |
| Beban Operasional | 30.363.436.099 | 34.231.730.124 |
| BebanLaindiLuarInvestasidanOperasional | 5.727.236.170 | 1.664.674.702 |
| Manfaat Pensiun | 640.787.041.966 | 553.333.724.615 |
| Pajak Penghasilan | 12.381.534.108 | 10.902.398.139 |
| Total PENGURANGAN | 713.626.846.683 | 630.096.134.701 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO | 597.618.172.794 | (111.542.845.020) |
| ASET NETO AWAL PERIODE | 7.125.655.958.098 | 7.237.198.803.118 |
| ASET NETO AKHIR PERIODE | 7.723.274.130.892 | 7.125.655.958.098 |

Sumber: LK Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, 2016

3. Neraca

Tabel. 3
 Laporan Neraca Tahun 2016
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

| KETERANGAN | 2016 (dalam Rp) | 2015 (dalam Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ASET INVESTASI | | |
| Surat Berharga Negara | 1.250.285.596.977 | 942.987.729.073 |
| Tabungan | 10.549.520.000 | 0 |
| Deposito On Call | 12.185.000.000 | 64.700.000.000 |
| Deposito Berjangka | 611.225.000.000 | 554.560.968.493 |
| Saham | 764.381.540.025 | 714.925.315.188 |
| Obligasi | 2.601.405.000.000 | 2.699.530.000.000 |
| Sukuk | 10.000.000.000 | 0 |
| Unit Penyertaan Reksadana | 1.068.595.585.890 | 1.196.048.640.025 |
| Penyertaan Langsung pada Saham | 363.489.238.500 | 164.739.178.500 |
| Tanah | 6.106.257.080 | 6.106.257.080 |
| Bangunan | 105.123.837.122 | 105.123.837.122 |
| Tanah dan Bangunan | 266.352.762.737 | 260.024.200.009 |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan | (186.753.799.594) | (178.105.260.244) |
| Jumlah Investasi | 6.882.945.538.737 | 6.530.640.865.246 |
| Selisih Penilaian Investasi | 784.137.876.939 | 553.833.478.653 |
| Aset Lancar Di Luar Investasi | 66.284.648.897 | 59.613.436.013 |
| Aset Operasional | 3.489.672.202 | 3.613.969.088 |
| Aset Lain-lain | 4.989.726.000 | 189.726.000 |
| Aset Tersedia | 7.741.847.462.775 | 7.147.891.475.000 |
| Liabilitas | | |
| Nilai Kini Aktuarial | 7.462.044.378.000 | 6.966.484.333.000 |
| Selisih Nilai KiniAktuarial | 261.229.752.892 | 159.171.625.098 |
| Liabilitas Di Luar Nilai Kini Aktuarial | 18.573.331.883 | 22.235.516.902 |
| Total Liabilitas | 7.741.847.462.775 | 7.147.891.475.000 |

Sumber: LK Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, 2016

4. Perhitungan Hasil Usaha

Tabel. 4
 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2016
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

| KETERANGAN | 2016 (dalam Rp) | 2015 (dalam Rp) |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Pendapatan Investasi | 627.407.223.788 | 635.892.087.927 |
| Beban Investasi | 24.367.598.340 | 29.963.607.121 |
| Hasil Usaha Investasi | 603.039.625.448 | 605.928.480.806 |
| Beban Operasional | 30.363.436.099 | 34.231.730.124 |
| Hasil Usaha Operasional | 572.676.189.349 | 571.696.750.682 |
| Pendapatan dan beban Lain-Lain | (5.108.287.230) | (1.027.620.338) |
| Hasil Usaha Sebelum Pajak | 567.567.902.119 | 570.669.130.344 |
| Pajak Penghasilan | (12.381.534.108) | (10.902.398.139) |
| Hasil Usaha Setelah Pajak | 555.186.368.011 | 559.766.732.205 |

Sumber: LK Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, 2016

5. Laporan Arus Kas

Tabel. 5
 Laporan Arus Kas Tahun 2016

LAPORAN ARUS KAS
 PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

| KETERANGAN | 2016 (dalam Rp) | 2015 (dalam Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Penerimaan Investasi | 579.224.816.488 | 566.123.781.565 |
| Pelepasan Investasi | 7.924.955.175.916 | 7.332.355.608.740 |
| Penanaman Investasi | (8.239.089.098.520) | (7.490.947.547.549) |
| Pembayaran beban Investasi | (14.816.492.455) | (20.556.741.689) |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi | 250.274.401.429 | 386.975.101.067 |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional | (62.819.387.642) | (57.333.756.643) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Penerimaan luran Peserta | 62.497.599.498 | 69.009.945.605 |
| Penerimaan luran Pemberi Kerja | 139.672.722.677 | 154.290.189.871 |
| Penerimaan luran Tambahan | 250.772.329.623 | - |
| Penerimaan Bunga Keterlambatan luran | - | - |
| Pembayaran Manfaat Pensiun | (640.801.149.615) | (553.324.702.816) |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan | (187.858.497.817) | (330.024.567.340) |
| Kenaikan (Penurunan) Kas / bank Bersih | (403.484.030) | (383.222.916) |
| Kas / Bank Pada Awal Periode | 797.911.911 | 1.181.134.827 |
| Kas / Bank Pada Akhir Periode | 394.427.881 | 797.911.911 |

Sumber: LK Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, 2016

PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun BPJS

1. Laporan Aktiva (Aset) Bersih

Laporan Aset Bersih memuat informasi tentang jumlah aktiva yang tersedia untuk membayar kewajiban Manfaat Pensiun. Laporan Aset Bersih harus menyajikan informasi berupa Investasi, Aktiva Lancar Non Investasi, Aktiva Operasional, Aktiva lain, Kewajiban diluar kewajiban aktuarial.

Laporan Aktiva Bersih Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember, memuat nilai aset neto akhir periode sebesar Rp 7.723.274.130.892 naik Rp 597.618.172.794 atau 8,38% dari tahun 2015. Komponen Aset Bersih Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada jenis investasi terdiri dari surat berharga negara, tabungan, Deposito On Call, Deposito Berjangka, Saham, Obligasi, Sukuk, Unit Penyertaan Reksadana, Penyertaan Langsung pada Saham, Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan. Jumlah investasi (nilai wajar) per 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.667.083.415.676 atau naik sebesar 8,22% dibanding per 31 Desember 2015 sebesar Rp 7.084.474.343.899. Arah investasi dana pensiun memperkenankan 7 jenis investasi, namun pada Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan ada 12 jenis investasi yang dikelola Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk kewajiban diluar kewajiban Aktuarial sebesar Rp 18.573.331.883 turun 16,46% dari tahun 2015 sebesar Rp 22.235.516.902. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan Laporan Aset Bersih Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No.18

2. Laporan Perubahan Aktiva (Aset) Bersih

Laporan Perubahan Aktiva (Aset) Bersih berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan tersebut yang diperinci atas penambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama periode tahun 2016.

Penambahan Aktiva Bersih sepanjang 2016 dapat dilihat pada tabel 2 adalah sebesar Rp 1.211.245.019.477,-. Pendapatan tersebut didapat dari komponen pendapatan Investasi, luran Jatuh Tempo, dan Pendapatan Lain Diluar Investasi. Pendapatan Dividen dan Pendapatan sewa tidak ada, hal ini dikarenakan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki jenis investasi yang menghasilkan pendapatan yang berupa dividen atau sewa. Tidak adanya pendapatan dari Laba(Rugi) Pelepasan Investasi dikarenakan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan penjualan ataupun pelepasan investasi. Akun Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain tidak ada, dikarenakan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan belum pernah menerima pindahan peserta pensiun dari Dana Pensiun Lain.

Pengurangan aktiva (aset) yang terjadi sepanjang tahun 2016 yang terdapat pada Laporan Perubahan Aktiva (aset) Bersih Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 713.626.846.683,-. Pengurangan yang terjadi disebabkan adanya Beban Investasi, Beban Operasional, Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional, Pemabayaran Manfaat Pensiun, serta Pembayaran Pajak Penghasilan. Kenaikan Aktiva (aset) Bersih sebesar Rp 597.618.172.794 diperoleh dari perbandingan atau selisih antara komponen Penambahan dengan komponen Pengurangan yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2016. Total Aktiva Bersih akhir tahun sebesar Rp 7.723.274.130.892 diperoleh dari Aktiva awal tahun sebesar Rp 7.125.655.958.098 ditambah dengan kenaikan Aktiva bersih yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar Rp 597.618.172.794,-.

Laporan Perubahan Aktiva (aset) Bersih yang disajikan oleh Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK No.18. Karena telah mengungkapkan secara jelas mengenai pos-pos yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan tentang aset bersih Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penyajiannya Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan juga telah memisahkan antara pendapatan investasi dan pendapatan di luar investasi sehingga besarnya masing- masing pendapatan telah cukup memberikan informasi tentang erubahannya bagi pengguna Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

3. Neraca

Dalam Neraca memuat posisi keuangan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, nilai historis, khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya.

Total Aset Tersedia Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 7.741.847.462.775 yang terdiri dari Aset Investasi sebesar Rp 6.882.945.538.737 Selisih Penilaian Investasi sebesar Rp 784.137.876.939, Aset Lancar Di Luar Investasi Rp 66.284.648.897, Aset Operasional Rp3.489.672.202, dan Aset Lain- lain Rp 4.989.726.000. Kewajiban, sisi kewajiban pada akun Kewajiban Aktuarial disajikan sebesar Rp 7.462.044.378.000,-. Selisih Kewajiban Aktuarial Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan bernilai positif atau surplus sebesar Rp 261.229.752.892 jumlah

ini lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 159.171.625.098. Selisih Kewajiban Aktuarial adalah selisih antara Kewajiban Aktuarial sebesar Rp 7.462.044.378.000 dengan Aset Tersedia sebesar Rp 7.741.847.462.775. Berdasarkan data diatas, maka rasio pendanaan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 adalah:

$$\frac{\text{Rp 7.741.847.462.775}}{\text{Rp 7.462.044.378.000}} \times 100\% = 103,43\%$$

Rasio pendanaan merupakan rasio untuk menentukan kualitas pendanaan suatu dana pensiun, dengan membandingkan antara kekayaan yang dimiliki dana pensiun dengan Kewajiban Aktuarialnya.

Berdasarkan rasio tersebut, maka kualitas pendanaan dari Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 berada pada Tingkat Pertama (I) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06/2002 dan perubahannya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2005 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja. Namun, pada hasil penelitian Siregar yang berjudul dampak penerapan PSAK 18 (revisi 2010) terhadap pelaporan keuangan dan audit atas laporan keuangan pada dana pensiun (studi kasus pada dana pensiun pemberi kerja), neraca tidak termasuk dalam laporan keuangan, namun ada tiga alternatif format yang bisa dipakai, yaitu :

Memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuaris dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat pasti juga berisi laporan perubahan nilai kini aktuarial dari

- manfaat purnakarya dan dari terjanji.
- Mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuaris yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.
- Mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris terpisah.

Secara keseluruhan Neraca Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan menyajikan laporannya sesuai dengan PSAK No. 18.

4. Perhitungan Hasil Usaha

Dana Pensiun adalah salah satu bentuk organisasi nirlaba, oleh karena itu, di dalam laporan keuangan tidak terdapat laporan laba rugi, melainkan suatu bentuk laporan perhitungan hasil usaha. Dalam perhitungan hasil usaha memuat pendapatan dan beban investasi, beban administrasi, dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Investasi Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada Tahun 2016 sebesar Rp 627.407.223.788 didapat dari Hasil berbagai macam investasi yang dilakukan oleh Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Beban investasi sebesar Rp 24.367.598.340 adalah beban yang ditanggung karena adanya Beban Transaksi dan Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan. Hasil Usaha Investasi pada

tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 603.039.625.448, dan Beban Operasional sebesar Rp 30.363.436.099.

Hasil Usaha Setelah Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp 555.186.368.011 didapat dari selisih Hasil Usaha Sebelum Pajak sebesar Rp 567.567.902.119 dengan Pajak Penghasilan sebesar Rp 12.381.534.108. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa Perhitungan Hasil Usaha Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No. 18.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan sesuai dengan sifat kegiatan usaha Dana Pensiun selama periode pelaporan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan untuk memahami perubahan aset bersih dan pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kekayaan.

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp 250.274.401.429 merupakan hasil dari Penerimaan Investasi dari berbagai macam jenis investasi yang dilakukan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional sebesar Rp 62.819.387.642 lebih besar 8,73% dari tahun 2015. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan defisit sebesar Rp 187.858.497.817 dikarenakan Total Pemabayaran Manfaat Pensiun lebih besar dibandingkan daripada total Penerimaan luran Peserta, Penerimaan luran Pemberi Kerja, Penerimaan luran Tambahan.

Penyajian Laporan Arus Kas Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No. 18 karena disajikan berdasarkan klasifikasi kegiatan Dana Pensiun yaitu kegiatan investasi, operasional, dan pendanaan selama periode tertentu. Dengan demikian Laporan Arus Kas Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan PSAK No. 18.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan Umum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan memuat Pengurus dan Dewan Pengawas Program Jaminan Pensiun. Kebijakan Akuntansi memuat Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan, Pengakuan Pendapatan dan Beban, Investasi, Aktiva Operasional, Selisih Kewajiban Aktuaria serta Kewajiban Aktuaria.

Penjelasan Per Akun dalam Laporan Keuangan meliputi: Investasi, Kewajiban Aktuaria dan Selisih Kewajiban Aktuaria, Pendapatan Investasi, luran Normal, Pendapatan Di Luar Investasi, Beban Investasi, Beban Operasional, serta Manfaat Pensiun. Penjelasan mengenai kekayaan untuk pendanaan, perhitungan kekayaan untuk pendanaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.510/KMK.06/2002 dan perubahannya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2005 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Catatan Atas Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dalam pengungkapan laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK No. 18. Secara keseluruhan penyajian Laporan Keuangan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK No.18 dan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep- 4777/LK/2003 tentang Data Elektronik Untuk Laporan Keuangan Dana Pensiun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pokok-pokok peraturan program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 baik dari sisi iuran maupun pembayaran manfaat pensiunnya. Untuk iuran 3% dari upah yang dilaporkan, 1% dibayar oleh peserta dan 2% dibayar oleh pemberi kerja. Pembayaran manfaat pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan ada dua macam, yaitu manfaat pensiun berkala dan manfaat pensiun lumpsum, adapun penerapan pembayaran manfaat pensiunnya menyesuaikan dengan kondisi peserta pada saat mencapai usia pensiun atau tidak lagi bekerja.
2. Proses akuntansi yang diterapkan oleh Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada bagian laporan keuangannya memuat laporan aktiva (aset) bersih, laporan perubahan aktiva (aset) bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, hal itu telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menerapkan Program Pensiun Manfaat Pasti seperti ; PSAK No.18, UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan.

ACKNOWLEDGEMENT

Tentunya penelitian ini tidak dapat dilaksanakan atau diselesaikan dengan tepat waktu tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, terutama pihak Universitas Fajar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah mempercayakan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Jakarta: ANDI.
- Bukit, Elvina O. 2012. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pertamina*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun*. Jakarta: Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Revisi Januari 2015. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cetakan 12. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kieso, Donald E. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Keduabelas Jilid 3. Jakarta: Erlangga.
- Latumaerissa, Julius R. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2002. *Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Presiden Republik Indonesia. 2015. *Penyelenggara Program Jaminan Pensiun*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- Puspitasari, Lusiana I. 2016. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Samryn, L. M. 2014. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Revisi. Cetakan ke 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Gracia Marina. 2012. *Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan Pada Dana Pensiun (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Program Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang *Dana Pensiun*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*